

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang sedang dijalankan oleh Pemerintah RI. Selain itu, peningkatan kualitas SDM yang memberikan perhatian yang serius terhadap keberagaman kebutuhan, permasalahan dan aspirasi semua kelompok masyarakat, akan dapat membuat pembangunan semakin efisien dan tepat sasaran.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 ini diperkirakan mencapai 231 juta jiwa. Dari total jumlah tersebut, 49,9% diantaranya adalah perempuan. Jumlah penduduk sebesar itu dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus dikelola dan diberdayakan secara optimal. Secara khusus, separuh penduduk Indonesia yang perempuan merupakan aset dan potensi pembangunan yang wajib dioptimalkan pemberdayaannya dan direalisasikan kemampuannya, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki di berbagai bidang pembangunan.

Aspek yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Remaja Perempuan (kaum perempuan) adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang merupakan landasan idiel dan operasional dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas pada hakekatnya telah menempatkan remaja perempuan (kaum perempuan) pada keluhuran harkat dan martabatnya, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun sebagai warga negara dan sumber daya pembangunan. Hal ini mencerminkan bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga kini, Pemerintah telah memiliki komitmen yang serius untuk memberikan status, peran, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki di dalam segala bidang kehidupan dan dalam seluruh kegiatan pembangunan.

Komitmen yang juga disepakati oleh Indonesia pada tahun 2000 adalah delapan Sasaran Pembangunan Millennium (*Millenium Development Goals*) yang harus dicapai pada tahun 2015, dan salah satu tujuannya adalah peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan remaja perempuan maupun kaum perempuan. Perempuan Indonesia tidak dapat dilihat sebagai kelompok yang homogen. Mereka terdiri atas dua kategori besar, yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya, dalam arti masih tertinggal kualitas

hidupnya dari laki-laki, masih termarginalkan dan terdiskriminasikan dalam lingkungan sosial-budaya mereka. Berkenaan dengan itu Soetomo (2006.30:31), pendekatan pemberdayaan remaja perempuan (kaum perempuan) pun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi afirmasi. Strategi pertama ditujukan terhadap perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan terhadap perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga. Melalui kerjasamanya dengan suami sebagai mitra sejajar, perempuan Indonesia mempunyai tugas dan peranan penting dalam mewujudkan tumbuh-kembang anak yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sejak anak berusia dini.

Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak.

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on The Right of Children* (CRC) sebagai salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam permasalahannya di lapangan peneliti menemukan berbagai macam permasalahan yang terjadi sehubungan dengan faktor-faktor penghambat pemberdayaan remaja perempuan pada organisasi PKK yang ada di Desa Lakeya Kecamatan Tolanguhula. Diantara faktor penghambat yang terjadi yakni secara internal maupun secara eksternal. Adapun faktor internal seperti, diri Sendiri, latar pendidikan, kurangnya motivasi dalam diri sendiri untuk berbuat yang terbaik buat masa depan. Faktor eksternal yang terjadi pada diri remaja perempuan pada organisasi PKK seperti, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman pergaulan, dan lingkungan dunia luar. Dari sekian faktor penghambat baik internal maupun eksternal maka pengurus organisasi PKK harus berusaha untuk memberikan arahan kepada mereka untuk senantiasa bersama-sama dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di desa tersebut melalui pemberdayaan remaja perempuan.

Adapun permasalahan di atas menunjukkan bahwa peran, posisi dan kondisi perempuan yang belum setara dengan laki-laki, serta kondisi dan

permasalahan anak, telah mendapatkan perhatian yang serius selama lima tahun terakhir ini. Meskipun demikian, tentu tantangan baru selalu ada, sejalan dengan perubahan sosial-budaya secara global maupun lokal, serta perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Oleh karena itu peran PKK yang bergerak dipedesaan harus selalu tanggap dalam mencari terobosan-terobosan baru untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dalam memberdayakan remaja perempuan (kaum Perempuan).

Untuk mewujudkan adanya peran perempuan dalam pembangunan di desa maka diperlukan manajemen organisasi yang baik dapat melalui peran PKK sebagai salah satu contoh organisasi kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kualitas masyarakat. Organisasi masyarakat ini juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. Seperti kegiatan PKK yang telah mampu meningkatkan pertumbuhan desa di bidang sosial. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM bagi seluruh masyarakat desa termasuk pada pemberdayaan remaja perempuan. Kegiatannya dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi terpadu. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh pengurus PKK dapat dilakukan oleh remaja perempuan melalui kegiatan tersebut.

Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan beberapa aparat Desa tentang pemberdayaan remaja perempuan di Desa Lakeya, terungkap bahwa kebanyakan masyarakat tidak memahami keberadaan sebuah organisasi kemasyarakatan ini yang berkiprah di setiap desa sehingga organisasi PKK ini

mengalami kesulitan dalam hal menangani masalah dalam memberdayakan remaja perempuan banyak para remaja khususnya remaja perempuan lebih suka hidup bebas tanpa harus mengikuti sebuah roda organisasi kemasyarakatan yang pada intinya demi kemaslahatan mereka dimasa yang akan datang dalam membangun desa mandiri yang kreatif. Adapun peran PKK dimata masyarakat tidak bedanya seperti arisan saja. Yakni, suatu kegiatan pertemuan ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap bulan dengan jamuan sekedarnya. Acara pun dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan santai dan kekeluargaan. Beruntung bila ketua PKK-nya hadir dan memberikan pembinaan ke arah kesejahteraan keluarga. Kalau ketua PKK tidak hadir dan pengurus tidak siap, jadilah pertemuan PKK menjadi acara ritual makan bersama. Lebih memprihatinkan lagi bila pengurus PKK tidak paham hakekat PKK itu sendiri. Pertemuan PKK menjadi ajang kontes baju, perhiasan, pamer tabungan, ngrumpi kian kemari yang tak berujung pangkal.

Ditambah lagi jika sasaran program yang dimaksud dalam memberdayakan remaja perempuan tidak terlaksanakan dengan baik. Sebab hal ini tidak mudah bagi pengurus PKK untuk melakukan suatu terobosan bagi keamsalahatan warga masyarakat. Dari permasalahan yang ada tentunya sangat berbeda antara warga yang satu dengan yang lainnya, hal ini bisa dilihat dari faktor yang menjadi permasalahan mereka baik secara internal seperti diri sendiri, pendidikan dan eksternalnya seperti faktor keluarga, masyarakat, dan teman pergaulan. Olenya itu seluruh pengurus harus berperan aktif dalam melaksanakan setiap tindakan bukan hanya untuk berkumpul dan diam dalam suatu organisasi

melainkan memikirkan bagaimana dapat memberdayakan warga remaja perempuan yang ada di Desa Lakeya tersebut.

Dari permasalahan di atas peneliti mengadakan sebuah penelitian yang dilihat dari dua pandangan yang berbeda yaitu factor-faktor penghambat pemberdayaan remaja perempuan dan peran organisasi PKK itu sendiri dalam hal memberdayakan remaja perempuan yang ada di desa lakeya.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah formulasi judul yakni: ***“Faktor-faktor Penghambat Pemberdayaan Remaja Perempuan pada Organisasi PKK di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.”***

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan di antaranya:

1. Apakah remaja perempuan belum berperan aktif dalam organisasi PKK.
2. Apa saja factor penghambat pemberdayaan perempuan pada organisasi PKK yang ada di Desa Lakeya
3. Bagaimana peran PKK dalam pemberdayaan remaja perempuan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor-faktor apakah yang menghambat pemberdayaan remaja perempuan pada organisasi PKK di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemberdayaan Remaja Perempuan melalui organisasi PKK di Desa Lakeya

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pengurus PKK yang ada di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula dalam memberdayakan kaum remaja perempuan yang terhindar dari segala macam problem berupa factor penghambat pemberdayaan, sehingga pembangunan di desa tersebut lebih terarah dan terorganisir dengan baik menuju desa mandiri.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi seluruh komponen masyarakat yang terlibat, baik pengurus PKK, masyarakat desa lakeya, para remaja perempuan yang menjadi objek dari penelitian ini, khususnya bagi peneliti. Melalui penelitian ini juga mudah-mudahan akan menjadi sebuah solusi dari sekian permasalahan yang dihadapi seperti hambatan maupun tantangan dalam melaksanakan program pemberdayaan remaja perempuan yang ada di desa lakeya.